

EKSISTENSI ORMAS ISLAM DALAM MEMBENDUNG FAHAM RADIKALISME DAN INTOLERANSI BERBANGSA DAN BERNEGARA DI KOTA LANGSA

Yustizar, M.Pd.I,
Dosen Tetap Fakultas Tarbiyah IAIN Langsa
Email: yus.tizar77@gmail.com

Muhajir, S.Ag, L.L.M
Dosen Tetap Fakultas Syariah IAIN Langsa

ABSTRAK

Masyarakat Kota Langsa lazimnya masyarakat sebagai makhluk sosial dalam berwarga negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang hidup berdampingan antara manusia satu dengan manusia lain, merupakan kehidupan yang sering diwarnai perbedaan termotivasi untuk menuntut saling dihargai dan dihormati. Sebagai salah satu wilayah yang mayoritas berpenduduk muslim seyogyanya kerukunan berbangsa dan bernegara menjadi tonggak utama dalam berinteraksi sesama manusia, tanpa ada perbedaan. Menjadi faktor penting dalam sebuah kajian interaksi kebangsaan dan kenegaraan dimana munculnya perbedaan disebabkan oleh kesalahan fahaman dalam menafsirkan rujukan yang digunakan sebagai referensi hidup. Radikalisme dan intoleransi menjadi akar pemikiran yang menganggap diri benar dan lainnya dianggap salah. Jika ditilik dari sudut pandang keagamaan, Islam merupakan agama yang sangat toleran yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kekeluargaan. Oleh sebab itu, menjadi sebuah simbul yang memaknai bahwa radikalisme dan intoleransi merupakan sifat fanatisme yang dapat membuat perpecahan ditengah-tengah masyarakat. Pemerintah Indonesia melalui peraturan-peraturannya menjadikan Ormas sebagaimana mitra untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjadi perpecahan serta menjaga perdamaian dalam berbangsa dan bernegara. Penting untuk dirumuskan dalam penulisan karya tulis ini, bahwa yang menjadi masalah adalah: Bagaimana eksistensi ormas Islam Kota Langsa dalam membendung faham radikalisme dan intoleransi serta faktor apa saja yang menjadi penyebab munculnya paham radikalisme dan intoleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk memperoleh jawaban tersebut penulis melakukan penelitian yang bersifat lapangan dan memadukan pengetahuan teoritis yang bersumber kepustakaan sebagai teori pendukung untuk memperoleh jawaban-jawaban yang dikehendaki, berdasarkan hasil opservasi dan wawancara yang penulis laksanakan dengan pimpinan ormas Islam. Maka diperoleh hasil, bahwa eksistensi Ormas Islam Kota Langsa dalam membendung faham radikalisme dan intoleransi adalah dengan memberikan bimbingan atau arahan pada umat Islam khususnya dan semua lapisan masyarakat pada umumnya. serta Peran lain yang dilaksanakan adalah bekerjasama dengan Pemerintah Kota Langsa, Ulama dan para Penegak Hukum dalam mengawasi agar tidak terjadi tindakan radikalisme dan intoleransi yang dapat memecah belahkan keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Kata kunci: Ormas Islam, Radikalisme dan Intoleransi, Berbangsa dan Bernegara

A. PENDAHULUAN

Kehidupan toleransi dan menghindari sikap radikalisme dalam berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan wujud dari semboyan Bhineka Tunggal Ika dimana hidup wajib menghargai dan berdampingan dengan manusia lainnya secara damai dan bersahabat. faktanya sering kita lihat kehidupan manusia di muka bumi yang seringkali diwarnai dengan munculnya berbagai perbedaan tidak terkecuali di Indonesia, dimana-mana terjadi peperangan, baik peperangan antar negara, suku, ras atau golongan yang pada dasarnya perbedaan tersebut dapat timbul dari berbagai aspek kehidupan, mulai dari sosial, politik, budaya, hingga agama. Adanya rasa egoisme sepihak dan keinginan yang tinggi untuk mempertahankan ideologinya sehingga sering sekali menimbulkan pemahaman yang selanjutnya dapat memicu kekerasan.¹ Misalkan saja perbedaan agama yang seringkali menimbulkan pertikaian antar manusia, sekalipun mereka beragama yang sama, juga demikian. Salah satu faktor yang menjadi penyebab timbulnya perbedaan tersebut yaitu kesalahan dalam menafsirkan rujukan berfikir yang digunakan sebagai pedoman hidupnya. Berbagai paham pun muncul di masyarakat akibat adanya perbedaan tersebut.² Sebelum jauh kita membahas maka perlu kiranya kita ketahui bahwa radikalisme adalah salah satu paham yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang menuntut adanya perubahan dengan jalan kekerasan. Jika ditinjau dari sudut pandang keagamaan, Radikalisme dapat diartikan sebagai sifat fanatisme yang sangat tinggi terhadap penganut yang berakibat terhadap sikap yang dapat menggunakan kekerasan dalam mengajak orang yang berbeda paham untuk sejalan dengan paham yang mereka anut. Salah satu bentuk radikalisme yang mengatas namakan agama misalnya seperti adanya organisasi garis keras Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) yang ingin membangun negara Islam atau

¹IrfanAhmad, *Islamism and Democracy in India: The Transformation of Jamaate-Islami*, (British: Pricenton University Press and Pricenton And Oxford, 2009), hal.78

²*Ibid*, Hal.55

gerakan-gerakan lain yang dilakukan oleh kelompok-kelompok atau golongan lain di Eropa atau China dan negara lain sebagainya, terhadap umat Islam minoritas disana, atau kelompok kecil lainnya adalah akibat dari ke egoisan mereka.

Perpecahan dan konflik yang mengatas namakan agama kerap terjadi. Padahal agama apapun melarang adanya perpecahan antar umatnya, di Indonesia fenomena kekerasan dan intoleransi antar masyarakat hingga saat ini masih terus berlangsung, pada hal Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Di tengah-tengah fakta intoleransi yang semakin merebak, dan kekerasan atas nama agama, suku, budaya, ras dan moralitas yang berlangsung di negeri ini, banyak orang-orang yang bertanya-tanya “jika intoleransi merebak, kezaliman dan penindasan atas manusia, apakah demokrasi masih di butuhkan?” ini adalah suatu pertanyaan yang tidak terelakan. Dimana Indonesia adalah bangsa yang memiliki keanekaragaman agama, ras, etnis, dan bahasa yang sangat erat dengan aturan-aturan negara. Secara ilmiah, hal tersebut seharusnya tidak untuk dibeda-bedakan antara satu dan yang lainnya, justru perbedaan tersebut di jadikan perekat dalam keragaman”.³

Beberapa tahun lalu di Indonesia banyak konflik yang pemicunya disebabkan kasus Sara, seperti peristiwa Ambon, Poso, Sampit, Aceh, sampai kasus dukun santet di Jawa Timur, semua diisukan bersumber dari SARA, lebih khusus masalah agama. Agama adalah obyek yang paling gampang untuk dijadikan pemicu (*tigger off*). Akibat adanya perseteruan ataupun kerusuhan disuatu daerah yang pada akhirnya merambat ke daerah yang lain, yang masih satu wilayah maupun luar wilayah yang berbeda. Memanasnya kondisi di suatu daerah lain dikarenakan adanya gejolak emosi yang begitu kuat. Awalnya kasus seperti ini hanya terjadi di beberapa daerah namun karena masyarakat merasa mereka adalah satu suku dan lain lain mereka ikut memusuhi atau menyerang kelompok yang mereka anggap musuh. Hal ini menyebabkan melebarnya kasus dan tidak terbendung lagi. Oleh sebab demikian. Maka, salah satu alternatif yang jitu untuk mengurangi tindakan intoleransi masyarakat adalah dengan

³Hassan Bhasri Marwa, *Islam dan Barat Dalam Membangun Teologi Dialog*, (Jakarta: LSIP, 2004), hal.41

menggalakkan pendidikan toleransi karena toleransi merupakan sifat atau sikap toleran.⁴ atau dalam makna lain merupakan sifat atau sikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dsb) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.

Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia akibat konflik agama yang terjadi diberbagai daerah beberapa tahun silam. Selain konflik yang disebabkan oleh kasus sengketa lain, konflik sering terjadi karena perbedaan pendapat antar suku atau ras yang menyebabkan terjadinya perdebatan dan menimbulkan konflik. Dalam satu artikel yang menceritakan bahwa Indonesia masih sangat rawan akan intoleransi.

B. PENGERTIAN DAN FUNGSI ORGANISASI MASYARAKAT

Organisasi secara etimologi berasal dari kata “organon”, yaitu “organum” mengandung arti: bagian, badan atau tubuh, sehingga menjadi kumpulan atau sekelompok orang yang terdiri dari latar yang berbeda dengan tujuan menyamakan persepsi dalam satu ikatan yang memiliki tujuan yang sama.⁵ organisasi merupakan sebuah perserikatan manusia yang berusaha untuk mencapai tujuan bersama yang harmonis didasarkan atas hubungan yang harmonis yang saling bekerja sama atas dasar hak, kewajiban serta tanggung jawab dengan meraih tujuan.⁶

Disisi lain organisasi merupakan penggabungan lebih dari dua orang yang berkerja sama dalam menggapai maksud yang dirumuskan secara sama, dan mengikat pada aturan dalam membangun hubungan pada kelompok yang dipimpin. Secara hakikatnya, organisasi merupakan sekelompok orang untuk mencapai tujuannya membentuk misi kelompok. Oleh sebab itu organisasi dapat di pandang kepada 3 aspek yaitu:⁷

⁴Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2002), hal.1204

⁵Zain Badudu, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hal.967

⁶M. Manulang, *Dasar-dasar Manajemen*, (Yogyakarta: UGM Press, 2015), hal.68

⁷Kartini Kartono, “*Pemimpin dan Kepemimpinan*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal.6-8

1. Organisasi dapat dipandang sebagai proses.
2. Organisasi sebagai kumpulan orang
3. Organisasi dipandang sebagai wadah.

Pendirian organisasi biasanya di susun secara bersama untuk tujuan bersama dalam mencapai tujuan yang dirumuskan dalam hasil musyawarah atau lebih dikenal dengan sebutan Visi dan Misi organisasi, pendirian suatu organisasi dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Adanya sekelompok orang penggerak untuk berdirinya suatu organisasi.
2. memiliki anggota
3. Memiliki aturan, sebagai landasan hukum berupa Anggaran dasar/AD dan Anggaran Rumah Tangga/ART.
4. Memiliki periode kepemimpinan dan struktur pengurus yang mendefinisikan bidang-bidang sesuai tanggung jawab dan wilayah kerja masing-masing.
5. Memiliki tujuan sebagai mana coraknya organisasi.
6. Memiliki sistem pengkaderan dan pergantian jabatan, yang berlandaskan aspek loyalitas, moralitas, tanggung jawab, integritas, serta prestasi.⁸

Sedangkan “kemasyarakatan” terdiri dari makna “masyarakat” yang berarti kumpulan individu yang menjalin kehidupan bersama sebagai suatu kesatuan yang besar yang saling membutuhkan, memiliki ciri-ciri yang sama sebagai kelompok masyarakat. Dengan demikian organisasi masyarakat merupakan adalah sekelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama-sama dirumuskan dalam nilai ideologi, dan kehendak yang sama tervalidasi dalam kepengurusan yang terstruktur yang memiliki kesesuaian secara jenjang, serta memiliki dedikasi dan tanggungjawab atas kepentingan pengurus yang dipimpinnya, kepentingan dimaksud adalah kesehatan, pendidikan, dan strata kehidupan, dan lain sebagainya sebagaimana kebutuhan masyarakat secara luas.⁹

Dalam UU No. 17 tahun 2013, masyarakat menyebutkan bahwa organisasi masyarakat (Ormas) adalah kelompok yang di dirikan dan dibentuk oleh

⁸*Ibid*, Zain Badudu,, hal.872

⁹*Ibid*

masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰

Tidak dapat dipungkiri bahwa eksistensi ormas di Indonesia telah hadir dalam segala bentuk dalam menyongsong pembangunan Indonesia, ormas menjadi filterisasi pembangunan mulai sejak Indonesia masih dalam jajahan hingga saat ini Indonesia sudah merdeka dan lebih maju, sumber idealnya adalah Pancasila dan semangat kebhinekaan yang tertanam dalam jiwa manusia Indonesia. Pancasila menjadi lambang pemersatu terhadap masyarakat global untuk saling menghargai dan menghormati atas dasar semangat ke Bhinekaan dalam keberagaman suku bangsa, Ormas juga memiliki azas perjuangan sebagai sebuah organisasi yang bersinergi dan tidak bertentangan dengan Pancasila, dan menjadikan Pancasila sebagai azas organisasi yang dibentuknya.¹¹

Pertumbuhan ormas di Indonesia membawa paradikma baru terhadap untuk kemajuan dan berkembangnya Ormas di Indonesia yang semakin menuntut peran dan fungsi serta tanggungjawab interaksi dalam kehidupan demokrasi berbangsa, dengan demikian Ormas dituntut berpartisipasi dalam mewujudkan cita-cita Proklamasi sebagai semangat pembangunan Nasional. Nilai paling dasar dari semangat tersebut adalah menjaga serta memelihara keutuhan dan kedaulatan bangsa dalam bingkai NKRI.

Perkembangan Ormas baik di tingkat lokal maupun nasional meningkat begitu pesat dengan menunjukkan angka yang begitu tinggi. Sebagai wujud demokrasi di Indonesia pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi memberi kesempatan terbuka bagi masyarakat secara luas untuk berpartisipasi dalam mengisi setiap lini pembangunan bangsa lewat Ormas masyarakat dapat mengaudit, memberi masukan, serta mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap jalannya pembangunan disegala lini, sebab terbentuk Ormas bukan melawan kebijakan

¹⁰Undang-Undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. Pasal (1)

¹¹*Ibid*

pemerintah tetapi membantu memberi masukan terhadap pemerintah demi kemajuan pembangunan bangsa. Ormas dibentuk oleh pemerintah berdasarkan penbitan izin yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementrian dalam Negeri Indonesia.¹² Sebagai ruang interaksi pemerintah dan ormas hakikatnya adalah sebagai:

1. Salah satu ruang sosialisasi bagi masyarakat.
2. penghimpun kepentingan anggota masyarakat dalam hal ini mencakup kepentingan publik
3. membangkitkan rasa peduli masyarakat bagi kepentingan pembangunan bangsa
4. Salah satu pilar demokrasi.¹³

Lazimnya fungsi Ormas untuk ikut berpartisipasi bersama pemerintah yaitu:

1. Sarana kepentingan bersama antar personal dalam organisasi.
2. Pembinaan serta pengembangan pengurus untuk mewujudkan tujuan organisasi.
3. Penyaluran kepentingan masyarakat.
4. Pemberdayaan masyarakat.
5. Pemenuhan pelayanan social
6. Sebagai upaya untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
7. Pemeliharaan dan pelestarian norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁴

Dalam Undang-Undang tersebut di atas diatur juga tentang larangan bagi sebagaimana tertuang dalam pasal 59, adalah:

1. Organisasi Masyarakat di larang:

¹²Tiara Meizhita, "*Analisis Framing Pro Kontra RUU Ormas dimedia Suara Pembaruan dan Republika*" (Jakarta: Hidayatulah, 2014), hal. 27

¹³DimasPrayoga, *Kebijakan dalam Pemberdayaan Organisasi Masyarakat*, (Pontianak: Universitas Pontianak, 2014), hal.4

¹⁴ Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

- a. Menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera dan lambang negara Indonesia.
 - b. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, atau atribut lembaga pemerintahan.
 - c. Menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera Negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera ormas.
 - d. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang, atau
 - e. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar ormas lain atau partai politik.
2. Organisasi Masyarakat, dilarang:
- a. Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan.
 - b. Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.
 - c. Melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan NKRI.
 - d. Melakukan tindakan mengganggu ketentraman, kekerasan, dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial.
 - e. Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Organisasi Masyarakat, juga dilarang:
- a. Menerima dari atau memberikan kepada pihak mana pun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Mengumpulkan dana untuk partai politik.

Uraian sebagaimana di kemukakan di atas menerangkan bahwa; Ormas seyogyanya dibentuk untuk menjembatani kelompok masyarakat dengan segala kepentingannya masyarakat untuk menjadi mitra pemerintah sejauh pemerintahan tidak menyimpang dari perundang-undangan dalam setiap kebijakan ke pemerintahannya dalam menyongsong pembangunan bangsa. Sesuai dengan regulasi yang ada dengan demikian peran Ormas, dalam hal ini tentunya sebagai fungsi kontrol dan kritikan yang sifatnya membangun untuk kepentingan yang lebih baik bukan sebaliknya dapat membahayakan kestabilan Nasional dan mengganggu ketentraman rakyat untuk hidup dengan damai.

C. TINJAUAN ORMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDOENIA

Dalam catatan sejarah hukum Indonesia, secara jelas dijelaskan melalui Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia adalah negara yang berpegang kepada hukum (*rechtsstaat*) sebagai landasan kebijakan dalam memerintah. Hal ini yang selanjutnya disebut sebagai pelaksanaan yang terkadang tidak secara “murni” menganut *rechtstaat*; artinya dalam ranah kebijakan pemerintah terkadang menyimpang dari pemaknaan perspektif hukum yang menyimpang, tentunya hal ini digunakan oleh pemerintah sebagai hak prerogatifnya untuk mengambil jalan tengah dalam wilayah kebijakan politik pemerintah tujuannya adalah untuk kestabilan keadaan dan menjadi tuntunan negara bagi kepentingan masyarakat secara nasional. Mahfud menjelaskan bahwa setelah Undang-Undang 1945 diamandemenkan, Indonesia bukanlah masalah negara yang sedikit semantik atau cenderung gramatikal namun juga menyangkut masalah yang substantif dan paradigmatic.¹⁵ Yang terjadi ditengah-tengah masyarakatnya.

Dalam hal ihwal perundang-undangan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-Undang yang ditetapkan oleh Presiden dalam tentunya berkaitan dengan kepentingan yang memaksa”. Berdasarkan uraian peraturan sebagaimana dijelaskan di atas tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan pemerintah mengeluarkan aturan tersebut adalah demi

¹⁵Moh. Mahfud M.D, “Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu”, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), hal. 384

kestabilan dan pertimbangan-pertimbangan kepentingan yang memaksa untuk dilaksanakan agar tidak menimbulkan ancaman bagi kestabilan negara.

Dalam peraturan nomor 2 Tahun 2017, tertuang penjelasan tentang “kepentingan yang memaksa” dimaksudkan: terdapat ancaman yang berdasar terhadap ideologi bangsa yang diprediksikan muncul ditengah-tengah masyarakat terorganisir memiliki keinginan untuk merubah lambang “Pancasila” dan menggantikannya dengan lambang atau ideologi lain; fenomena ini tampak pada gerakan ormas-ormas tertentu yang mengkampanyekan anti-Nasionalisme dan anti-demokrasi. Salah satu contoh adalah Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Ormas Forn Pembela Islam (FPI) dimana dalam praktiknya telah melanggar peraturan yang disahkan dan dijalankan pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah membubarkan Ormas tersebut karena nilai-nilai Ormas ini memiliki dampak kurang baik dan mengancam kestabilan keamanan nasional.

Kendatipun pembubaran Ormas tersebut menuwai protes di tengah-tengah masyarakat dan para netizen di dunia digital karena pemebubaran tersebut tidak melalui proses peradilan. Pembubaran tersebut merupakan pertimbangan dari berbagai elemen masyarakat yang melaporkan kepada pemerintah sehingga menuntut pemerintah mengambil sikap tegas dengan menggunakan hak preogratifnya sebagai pimpinan negara sebagaimana tercantum pada butiran pasal 12 UUD 1945, berfokus kepada pasal 14 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Definisi Grasi sebagaimana tertuang dalam pasal 14 ayat 1 dimaksud adalah di jelaskan pada UU No. 22 tahun 2002 yaitu tentang UU Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, pengurangan, peringanan atau penghapusan pelaksanaan.

Atas dasar peraturan kewenangan tersebut, berdasarkan masukan dan pertimbangan mengganggu ketertiban nasional maka presiden memberhentikan atau mencabut hak-hak berorganisasi pada organisasi-organisasi yang dianggap dapat memicu ketidak stabilisan negara. Dari pihak yang tidak mensetujui kebijakan pemerintah serta membentuk perlawanan dan membangun gerakan-gerakan untuk berdemokrasi yang dianggap sebagai upaya pembungkaman

terhadap ruang demokrasi yang merupakan hak rakyat yang kembali untuk kepentingan rakyat. Pengurus Harian PB NU menyampaikan bahwa "*Perpu akan mempercepat proses hukum penanganan ormas radikal, tanpa memberangus hak-hak konstitusional ormas*".¹⁶

Menarik, ketika kritikan atas penolakan peraturan oleh para pakar hukum di Indonesia menilai, penerbitan Perpu ini adalah sebagai bentuk represif pemerintah yang menghilangkan proses pengadilan dalam membubarkan Perpu. Ada pula yang menilai, bahwa syarat kegentingan yang memaksa tidak terpenuhi dalam penerbitan perpu ini. Dari pernyataan salah satu Pakar Hukum Tata Negara sekaligus menjadi Kuasa Hukum HTI, Yusril Ihzha Maheendra seperti yang dimuat dalam portal berita online Kompas menyatakan "Ini adalah ciri pemerintahan otoriter. Dalam praktiknya nanti, Presiden bisa secara diam-diam memerintahkan Menkumham untuk membubarkan ormas, tanpa Menkumham bisa menolak kemauan Presiden".¹⁷

Hal ini yang melatar belakangi pemahaman untuk mengkritisi latar belakang peraturan dari sisi keilmuan Hukum di Indonesia. Secara konprehensif idiologi hukum yang tegas terhadap ormas menjadi pertimbangan bagi masyarakat itu sendiri, bahwa pendirian ormas yang bertentangan dengan hukum menjadi boomerang bagi Negara sebagaimana penghapusan yang terjadi beberapa waktu lalu pada proses peradilan dalam pembubaran ormas HTI dan FPI yang dianggap berbahaya dalam negara hokum yang berdemokrasi di Indonesia. Selain kasus HTI dan FPI sebagaimana diuraikan di atas berbanding terbalik dengan uraian ormas lain yang ada di Indonesia saat ini, pembentukan Ormas yang berdiri ditengah-tengah masyarakat tumbuh dari suatu kesadaran untuk memberdayakan masyarakat yang peduli terhadap pembangunan dari azas bangsa yang juga tertuang dalam Visi dan Misinya Ormas masing-masing.

¹⁶Kumparan, *Perppu No.2 Tahun 2017*, diakses dari <https://kumparan.com/kesadaran-adalah.matahari/> dukungan-berbagai-komp.onen-bangsa-terhadap-perppu-no-2-tahun-2017. (Dikutib pada tang.gal 23 Juli 2019 pukul 14.13)

¹⁷Ihsanuddin, *Kritik Yusril Ter.hadap Ketentuan Pidana Da.lam Perpu Ormas*, ditulis pada 14 Juli 2017, diakses melalui dari <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/14/11303151/kritikyusril-terhadap-ketentuan-pidana-dalam-perppu-ormas>. (Dikutip pada pada tanggal 23 Juli 2019 pukul 14.15)

Usman Bin Affan ra, sehingga kelompok-kelompok terjadi dalam Islam dan masing-masing mengatasnamakan dirinya yang benar. Dari ini lah kesalahan penafsiran itu mulai terjadi. Namun demikian bukan berarti Islam menganjurkan untuk saling bermusuhan, haikatnya *amar ma'ruf nahi mungkar* adalah bentuk dari persatuan yang saling nasehat-menasehati dalam kebaikan dan keselamatan, bukan sebaliknya. Berdasarkan semangat kebersamaan sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah Saw, dengan demikian terbentuk Ormas Islam yang selanjutnya Ormas Islam menyeru untuk membangkitkan kembali semangat keagamaan. Ormas-ormas Islam yang di maksud disini adalah sebuah organisasi keagamaan Islam.²⁰

E. PERAN DAN FUNGSI ORMAS ISLAM

Sebagaimana uraian pada subbab di atas dan oleh karena dampak kehancuran peradaban Islam serta bangkitnya peradaban Eropa dan Barat. Maka peran dan fungsi Ormas Islam menjadi sebuah kiat untuk kembali membangkitkan ajaran Islam terutama dalam penerapan kebijakan Negara yang adil sebagaimana seruan yang pernah diajarkan dan dilaksanakan oleh Rasulullah Saw.

Semangat baru memicu kebangkitan umat Islam di Timur Tengah adalah pengaruhnya sangat besar terhadap dunia Islam lainnya, tidak terkecuali di Indonesia. Gairah kebangkitan ormas ini ada yang dinamakan kebangkitan intelektual dan pergerakan Islam dan gerakan ini mulai terjadi sejak perlawanan merebut kemerdekaan negara Indonesia kalau dalam negara Indonesia dan gerakan lainnya yang terjadi di negara luar. Di Indonesia gerakan ini mulai ada sejak melawan penjajahan dan bangkit lagi pada akhir dekade di tahun 1980-an.

Sebelum orde baru runtuh gerakan Ormas yang tergabung dari beberapa unsur baik dari kalangan muslim dan non muslim bersatu melawan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat pada masa itu. dimana semangat yang serasa didiskriminasi atas hak-hak rakyat terus-menerus menggencet dan mengebiri gerakan Ormas baik Islam maupun agama lainnya, dengan cara-cara represif.

²⁰M. Nuruddin Zuhdi, "*Perempuan dalam Revivalisme: Gerakan Revivalisme Islam dan Politik Anti Feminisme di Indonesia*," Musawa; Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol. 9, No. 2, Juli 2010.

Mereka dianggap sebagai gerakan separatis yang isinyalir akan membahayakan kekuasaan Soeharto dan keutuhan Pancasila. Pada tahun 1990-an, pergerakan ormas-ormas ini semakin menemukan muaranya, seiring demi perubahan atas kebijakan politik yang dilakukan oleh pemerintah berkuasa saat itu. kemudian Semenjak saat itu pula, berbagai unsur dari kalangan Ormas baik muslim maupun non muslim mendapat kesempatan yang tempat dan universal dalam ruang-ruang mengatasnamakan demokrasi rakyat terpimpin, serta berbagai kebijakan pemerintah berusaha mengakomodir aspirasi gerakan pembaharuan Ormas-Ormas. Contoh diantaranya: setelah adanya Undang-Undang Peradilan Agama (1989) dan peraturan lain, kemudian mulai bermunculan Ormas-Ormas seperti ICMI (1990), Gerakan Masyarakat Gereja dan Ormas lainnya yang selanjutnya mulai bermunculan lagi Ormas-Ormas baru lainnya.

Relasi gerakan Ormas Islam, misalkan. dalam lanskap percaturan politik di Indonesia selalu menarik untuk didiskusikan. Dianataranya adalah Kajian tentang Islam dan negara telah banyak memikat para ilmuwan dari dalam dan maupun luar negeri. Untuk membahas persoalan-persoalan baik tentang pemerintahan, hukum, politik hingga ritual ibadah. Beberapa persoalan yang dijadikan bahan kajian terkait hubungan Islam dan negara, agama dan politik, fundamentalisme dan radikalisme Islam, ekspresi politik umat Islam, parpol Islam dan dinamika gerakan politik Ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia. Semakin hangat dan terjadi di Indonesia yang seolah-olah agama menjadi dogma yang terpisahkan dalam sistem negara. Indonesia merupakan negara dimana penganutnya dominan muslim terbesar dunia. Bentuk ekspresi dari aspirasi umat Islam tidak pernah tunggal dan monolitik melainkan plural apalagi padangan tersebut berkaitan dengan masalah agama dan negara di Indonesia.

Dinamika Ormas yang cendrung gerakan politik yang mengusung nilai-nilai ke autentikan Islam di Indonesia sangat menarik untuk dikaji. Ormas Islam sebagai kaum mayoritas memiliki peran yang penting dalam kehidupan berbangsa dan negara. Kontribusi Ormas Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti perjuangan kemerdekaan dalam pergerakan nasional untuk mencapai

Indonesia merdeka dan lain sebagainya.²¹ Hal inilah yang selanjutnya dapat merubah wajah Ormas Islam yang berdiri dalam menjalankan Visi dan Misinya di Indonesia bervariasi, mulai dari konservatif, moderat, dan bahkan radikal. Masing-masing bentuk tersebut memiliki visi, ideologi, karakter gerakan yang terkesan dari kustum menandakan Ormas radikal atau nonradikal (moderat), yang kemudian dalam pandangan pemerintah mencoba mengklasifikasikannya mana Ormas yang berpotensi radikal dan tidak radikal, melalui pengintaian badan inteligen negara data berhasil dikumpulkan dan kemudian menjadi kebingungan pemerintah untuk menggunakan hak prerogatifnya untuk menonaktifkan atau tidak.

Kalau saja kita berkiblat kepada peran dan fungsi Ormas dalam Islam. Maka sesuai dengan fitrahnya sebagaimana yang telah dicontohkan baginda Rasulullah Saw dalam kehidupan sehari-harinya. Bahwasanya kehidupan manusia termasuk kehidupan berpolitik dan bernegara, juga tidak terpisahkan dari ajaran Islam.

Berdasarkan penjelasan diatas secara konseptual Islam telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara menjadi negarawan yang baik, bukan berarti mengharuskan menjadikan negara secara totalitas menggunakan konsep Islam, dalam menjunjung tinggi keberagaman Islam juga menganjurkan umatnya untuk menghormati agama lain, *lakumdinukum waliyadin* cukup menghargai dan menghormati yang lain agama dalam Islam dan Islam tidak memaksa agar orang yang bukan muslim memaksa dia masuk dan memeluk Islam. Namun secara realitas Nabi Muhammad Saw telah mengajarkan kita bagaimana hidup saling menghormati dan saling menghargai. realitas sejarah Islam yang menunjukkan bahwa kehidupan Nabi Muhammad Saw.pada periode Madinah (622-632) adalah contoh suritauladan yang baik, dimana oleh banyak pemikir Islam menganggap sebagai Islam adalah agama yang didalamnya tertuang ajaran yang telah banyak menuai keberhasilan dalam memimpin negara. Contoh ini kemudian menjadi panduan bagi umat Islam dalam kaitannya dengan masalah kenegaraan, dari

²¹Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa, Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad Ke-20* (Bandung: Mizan, 2005), hal.250–255

peristiwa ini banyak mengajarkan kita agar saling menghargai satu dengan yang lainnya. penganut Islam meyakini dengan sesungguhnya bahwa agama dan negara (*Islām huwa al-dīn wa aldaulah*) adalah satu kesatuan yang keduanya tidak dapat dipisahkan.²² Yang di perlukan adalah bagaimana satu dengan yang lainnya saling menghormati dan menghargai baik dalam berinteraksi sosial dan juga ibadah.

F. FAHAM RADIKALISME DAN INTOLERANSI

1. Faham Radikalisme

Secara hakikat faham radikalisme diadopsi dari kata *radic* yang mengandung makna berpikir secara mendalam untuk menelusuri akar permasalahan. Radikalisme merupakan oleh sebahagian pemikir menafsirkan perjuangan yang berhubungan dengan ideologi atau faham oleh sekelompok orang dalam berorganisasi yang bertujuan menjalankan kepentingan politik dengan jalan kurang tepat.²³ Di sisi lain radikalisme dapat ditafsirkan sebagai sebuah pemikiran yang selanjutnya menjadi keyakinan dari seseorang kepada kelompoknya yang begitu tinggi terhadap menjadi satu faham, yang menjadi realisasi atas gerakan terencana yang memungkinkan bahwa apa yang dimaksudkannya adalah benar sedangkan pemikiran atau pemahaman lain dipandangan salah, sehingga layak diabaikan, dihilangkan atau dihukum. Dari dasar ini kemudian radikalisme dan intoleransi membentuk perbuatan kearah ekstremisme, disertai dengan perbuatan yang kemudian cenderung untuk menggunakan kekerasan, tujuannya kepada orang atau kelompok yang berbeda cara memahami faham yang dianutnya. Berdasarkan pahaman tersebut, dapat dibangun satu penjelasan mengenai toleransi/intoleransi dan radikalisme bahwa adalah suatu keputusan dalam kedewasaan berfikir yang dapat menjadi sebab akibat dalam bertindak.²⁴

²²Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), hal.1–2.

²³Nurjanah, *Radikal Versus Moderat, Atas Nama Dakwah Amar Makruf dan Nahi Mungkar dan Jihad*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hal. 7

²⁴Bagus Takwin dkk, *Penelitian Tentang: Studi Toleransi dan Radikalisme; pembelajaran dari 4 daerah Tasilmalaya, Jogjakarta, Bojonegoro dan Kupang*, (Jakarta: Infid, 2016), hal.231

Berkaitan erat dengan radikalisme, maka sangat identik atau berkaitan adalah dogma kekauan tanpa ada kritik pengetahuan yang universal. Fenomena radikalisme sering terjadi dan nyaris di semua agama, bukan hanya pada muslim sebagaimana isu internasional yang menganggap Islam agama teroris akan tetapi jika ditelisik lebih jauh dan mengatas namakan agama, maka agama lain di eropa dan dunia barat seperti agama-agama lain juga banyak melakukan perbuatan yang sama. Seperti kekerasan negara lain terhadap kaum minoritas Islam di negaranya. Gejolak perebutan wilayah di Faletina antar Israel dengan Islam palestina, kekerasan atas nama agama Sinto di Jepang.²⁵ dan fenomena-fenomena lainnya yang kerap terjadi selama ini. Secara hakikat kekerasan dan mengatasnamakan agama, terdapat benih-benih mulai bersemainya sikap intoleran. buktinya, peristiwa radikalisme yang selama ini terjadi selalu berakhir dengan malapetaka bahkan ada peristiwa bunuh diri akibat radikalisme yang mana menandakan adanya ketidak matangnya ajaran tentang sikap tawakal dan bersabar atas peristiwa yang tidak sesuai dengan kehendak dirinya.²⁶

Jika peristiwa radikalisme terjadi atau dilakukan oleh umat Islam, maka radikalisme tersebut secara gamblang dituduh dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam atau berbasis Islam, dan menjadi kalim atas landasan ajaran.²⁷ namun yang sangat sulit untuk difahami dan sangat sedikit isu radikal yang dilakukan oleh umat beragama lain selain agama Islam. Mungkin hal ini disebabkan oleh gerakan yang menyebarkan faham kebencian atau mungkin bahagian dari skenario politik untuk menghancurkan Islam secara internal.²⁸

²⁵Hasan M. Noor, “Islam, Terorisme, dan Agenda Global” dalam *Perta*, Vol.V/No.02/202, hal.4-5.

²⁶Zuly Qodir, *Radikalisme Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal. 62.

²⁷Nurjanah, *Radikal Versus Moderat, Atas Nama Dakwah Amar Makruf dan Nahi Mungkar dan Jihad* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hal. 7

²⁸J.U Thalib, *Radikalisme dan Islamophobia, Islam dan Terorisme*, (Yogyakarta: UCY, 2003), hal. 107

tentu semestinya ada juga faham radikalisme yang menunjukkan umat Islam garis keras.²⁹

Gerakan radikal pada umumnya dapat diartikan sebagai tindakan terorganisir dan bukan berarti gerakan radikalisme dan tidak bersifat individual melainkan kolektif dan terorganisir.³⁰ dalam pandangan lain istilah radikalisme dapat dimaknai sebagai kritik yang cenderung radikalisme, fundamentalisme, ekstremisme, revivalisme, bahkan semuanya digeneralkan mengarah pada terorisme.³¹ Namun pada dasarnya radikalisme adalah persoalan sulit dan kompleks yang dapat timbul karena faktor-faktor kesenjangan. Munculnya faham radikalisme bukan berarti karena berpegang pada penafsiran teks suci seperti yang diajarkan agama, tentunya pemikiran ini adalah salah dalam menafsirkan teks suci tersebut. Agama samawi tidak ada yang mengajarkan pemeluknya seperti gaya pemikiran tersebut. Contoh saja pada masa *khilafah Islamiyah*, penolakan modernisasi-sekularisme tidak terjadi bahkan dianggap sebagai pengetahuan baru yang penting demi kemajuan Islam saat itu, bahkan adagerakan pembaharuan dalam konsep pengembangan ekonomi, perkembangan keilmuan, persaingan pembangunan secara global, dan sebagainya. Semua faktor inilah yang menjadi *raison d'être* gerakan-gerakan garis lunak dalam Islam.³²

Penting untuk diketahui bahwa mulai tahun 1998 gerakan radikal di Indonesia dapat menimbulkan kecemasan secara universal, banyak di kalangan umat Islam tidak menyetujui hal itu terjadi. Oleh sebab itu bukan berarti gerakan yang dilakukan oleh umat Islam adalah gerakan Islam radikal. tindakan-tindakan ini mereka yang tidak mendapat dukungan dari umat Islam di Indonesia. Bahkan kelompok-kelompok radikal ini sering dituduh membajak suara umat Islam dengan mengklaim dan mengatasnamakan tindakan mereka

²⁹Nurjanah, *Faktor Pemicu Munculnya Radikalisme Islam Atas Nama Dakwah*, (Jurnal Dakwah, Vol. XIV, No. 2 Tahun 2003), hal. 181.

³⁰M Zaki Mubharak, *Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran, dan Prospek Demokrasi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2007), hal. 53.

³¹Lina Katib, *Filming the Modern Middle East, Politics in the Cinemas of Hollywood and the Arab World*, (London: I.B. Tauris and Co. Ltd, 2006), hal. 169

³²Azyumardi Azra, *Konflik Baru Antar Peradaban, Radikalisme dan Pluralitas* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal.6

untuk kepentingan Islam.³³ padahal bukan sama sekali, disini juga ada kepentingan politik yang tinggi yang sudah pasti melibatkan para elit politik dengan mengatasnamakan agama untuk menakuti para minoritas agama lain yang ada di Indonesia.

Dapat kita amati secara nyata bahwa tindakan radikal mungkin saja didorong oleh motif politik bukan terjadi atas kemauan rakyat secara umum, tentu kepentingan ini untuk kepentingan kelompoknya saja yang akhirnya menyebabkan terjadinya perbuatan radikal. Perbuatan radikal tersebut dapat saja terjadioleh sebab Pertama, penganut garis geras yang mengalami kekecewaan karena ketertinggalan dari nilai-nilai kemajuan yang bisa saja datangnya dari kemajuan dunia Barat. Kedua, kemunculan kelompok garis ekstrims yang tidak terlepas dari pendangkalan pemahaman agama secara universal. Pemahaman ini didasarkan kepada pemahaman secara literatur bahkan terkadang tekstual tanpa kajian lebih mendalam.³⁴

2. Faham Intoleransi

Kalau definisi toleransi menurut Soerjono merupakan sikap yang atau perwujudan sikap dan pemahaman diri pihak lain yang tidak disetujui.³⁵ maka toleransi adalah sikap toleran, yaitu bersifat atau bersikap lunak.³⁶ Demikian juga, “toleransi” yang berasal dari bahasa Latin, adalah “*tolerare*” yang berarti, “menahan”, menaggung, membetahkan, membiarkan, dan tabah. Dalam bahasa Inggris, toleransi berasal dari kata *tolerance/ tolerantion* yaitu Kesabaran, kelapangan dada.³⁷

³³*Ibid*, Hal114

³⁴Abdurrahman Wahid, *Islam.ku Islam Anda dan Islam Kita: Agama Masy.arakat Negara dan Demokrasi*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hal. xxvi.

³⁵Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: Royandi, 2000), hal.518.

³⁶W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal.1084.

³⁷John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia, 2007), hal. 595

Dalam Islam dikenal dengan istilah *tasamuh* yang berarti juga toleran artinya ampun, ma'af dan lapang dada.³⁸ Islam sangat menghargai perbedaan. Banyak ayat Al-Qur'an yang memberi ruang kepada nilai-nilai toleran. Toleransi sudah seharusnya dikaji secara mendalam dan diaplikasikan dalam kehidupan beragama karena toleransi merupakan jalan bagi tercapainya kerukunan antar umat beragama.

Dalam konteks toleransi bentuk-bentuk sikap toleransi, antara lain:³⁹

- a. Bersabar atas perbedaan, karena perbedaan merupakan rahmat dari Allah Swt.
- b. Tidak memaksakan orang lain dalam hal keyakinan (agama).
- c. Tidak membedakan (mendiskriminasi) orang lain yang berbeda keyakinan.
- d. Memberikan kebebasan kepada orang lain untuk memilih keyakinan (agama) nya.
- e. Tetap bergaul dan bersikap baik dengan orang yang berbeda keyakinan dalam hal kepentingan duniawinya.
- f. Tidak mengusik atau mengganggu orang yang berbeda keyakinan ketika mereka melakukan beribadah.
- g. Menghormati orang lain yang sedang beribadah.
- h. Tidak membenci atau menyakiti perasaan orang lain yang berbeda keyakinan.

Belajar dari pengalaman toleransi pada masa Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasullulah yang terjadi pada tahun 610 an M. Dimana Waraqa bin Naufal, seorang tokoh beragama Nasrani, yang telah lama menjalin persaudaraan dan saling mengakui kebenaran keyakinan mereka masing-masing serta menghormati keyakinan orang lain merupakan suatu peristiwa luar biasa yang dapat di petik hikmahnya, ketika Raja Najasy yang berasal dari Ethiopia meninggal dunia, Nabi sendiri yang meminta para sahabat untuk

³⁸Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawir* (Yogyakarta: Balai pustaka Progresif, t.th), hal. 1098

³⁹Pasurdi Suparlan, *Pembentukan Karakter*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hal.78.

menyembahyangkan, pada hal belum ada kejelasan sebelumnya apakah Raja Najasy itu seorang muslim atau tidak. Bahkan dalam peristiwa lain ketika Nabi berdialog dengan delegasi yang datang dari Najran yang beragama kristen di Masjid Madinah dan kemudian delegasi tersebut memohon izin untuk menjalankan kebaktian di luar, Nabi menyarankan agar delegasi tersebut melakukan kebaktian di dalam Masjid.⁴⁰ tentunya ini menjadi contoh yang sangat mulia yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. Peristiwa ini andaikan dapat diterapkan di zaman ini mungkin besar konflik toleransi dan berbangsa dan bernegara dimanapun mungkin tidak akan terjadi.

G. MAKNA KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Kehidupan masyarakat dalam melaksanakan ibadah disisi keberagaman dalam berbangsa adalah makna paling mendasar yang seharusnya sudah ada pada masyarakat Indonesia yang merupakan negara yang terdapat beragam etnik, suku, ras dan golongan. Interaksi masyarakat Indonesia yang hidup saling berdampingan antara satu dengan lainnya. Dikatakan sebagai warga negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia yang menganut dan menjalankan serta mempraktikkan kehidupan yang berdemokrasi, menjadi pilar peradaban dunia luar bahwa kehidupan beragama menjadi kehidupan yang damai berbeda dengan manusia yang tidak memiliki agama sama sekali.

Jimli Ashiddiqie mengemukakan setidaknya ada 12 dasar yang menjadi kedudukan sebagai tiang hukum yang memiliki iklim harmonis diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya prinsip Supremasi hukum
2. Persamaan hak dalam penegakkan hukum
3. Azas Legalitas
4. Pembatasan hak atas kekuasaan
5. Memiliki organ penunjang yang independen
6. Peradilan yang bebas dan tidak memihak
7. Peradilan tata kelola Negara yang adil

⁴⁰Malik Muhammad, "Pluralisme Agama dan Toleransi Dalam Islam," *Dialog-Jurnal Penelitian dan Informasi Keagamaan*, 2002. No 54 Th.XXV, Desember

8. Mahkamah Konstitusi yang berintegritas
9. Perlindungan atas Hak Azasi Manusia
10. Memiliki sifat demokrasi
11. Memiliki fungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan dalam bernegara
12. Transparansi serta kontrol sosial.⁴¹

Sebagai cerminan hak asasi manusia dan wujud keharmonisan dan perlindungan dalam bernegara di Indonesia maka sangat memerlukan; *Pertama*, Kenyamanan atas setiap prinsip sosial, antar sesama mengedepankan prinsip keseimbangan (*at-tawaazun*) kaitanya menerima informasi yang tidak mengadili salah dan toleran (*at-tasaamuh*). serta menghormati di tengah perbedaan, khususnya perbedaan agama atau aliran, serta adil (*al-adaalah*) serta bersikap bijak jika menjadi penguasa dalam menegakkan hukum. *Ke dua*, rasa sosial atas empati sosial pada setiap individu atas kedudukan dan rasa peduli yang sebenarnya

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukan hanya berada dalam permasalahan berkaitan konsep dalam agama dalam menyatukan keberagaman kehidupan berbangsa dan bernegara, namun bermacam teori atau wacana ke negaraan yang difaktori oleh pemikiran atas idologis. Indonesia pada dasarnya dibangun atas dasar konsep bangsa berdasarkan UUD 1945 yang semua aspek kehidupan manusia dalam bernegara dan beragama diatur didalamnya dan melindungi kebebasan atas hak-haknya sebagai warga Negara.

Satu azas yang merupakan pemikiran logis adalah azas Negara hukum, artinya bagi satu negara demokrasi pastilah menjadikan pula “hukum” sebagai salah satu asasnya yang lain.⁴² Yang tak kalah menarik adalah di Indonesia yang penduduknya multikultural diterapkan demokrasi pancasila dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya serta menghubungkan negara serta agama dalam perspektif hukum Islam, harusnya keinginan bernegara itu merupakan refleksi yang kemudian muncul dalam diri manusia itu sendiri sebagai makhluk yang bersosial, yang tumbuh keinginan berorganisasi.

⁴¹Jimly Asshiddiqi, “*Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 130.

⁴²Maya Dahnia, *Empati dan Identitas Sosial*, (Kompas, 22 Desember 2011), hal.95

Mukti Ali sebagaimana dikutip Munawar Ahmad menjelaskan tentang kerukunan beragama dalam berbangsa dapat dicapai melalui pemikiran, diantaranya ialah: *Pertama, singkretisme* yakni pendapat yang menyatakan semua agama sama. *Ke dua, responception* yaitu mendalami serta meninjau ulang agama pada dirinya sendiri dalam keselarasan dengan agama orang lain. *Ke tiga, sintesis* dalam menciptakan suatu agama yang sama pemahamannya diambil dari berbagai kepercayaan lain. *Ke empat, pergantian*, yaitu mengakui bahwa agama yang dianutnya yang tepat dan berusaha dengan sengaja mengajak orang lain ke dalam agama yang dianutnya. *Ke lima, agre indisagrement* yaitu setuju kendati perbedaan yang merupakan, kepercayaan agama yang dianutnya merupakan agama sempurna, kemudian memaksa yang beragama lain mempercayai agama yang dianutnya. Dan serta meyakini agamanya dan agama lain berbeda dalam segala hal.⁴³

Dapatlah disimpulkan bahwa makna kehidupan berbangsa dan beragama dapat diraih dengan menghargai perbedaan pendapat, kepercayaan dan hak-hak lainnya sebagai warga Negara dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika dibawah naungan pancasila sebagai lambing Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana wujud yang dicita-citakan bersama dalam rumusan UUD 1945.

H. Eksistensi Ormas Islam Kota Langsa

Ormas Islam dan masyarakat yang berdomisili di Kota Langsa sejauh ini sudah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk merawat dan menjaga kestabilan hidup dengan para penganut agama lain. Wujud dari eksistensi ini dapat diamati oleh kondusifnya wilayah Kota Langsa dari geraka-gerakan radikalisme dan intoleransi yang dapat merusak persaudaraan yang ada ditengah-tengah masyarakat Kota Langsa.

Pasca konflik yang berkepanjangan yang pernah terjadi di Aceh, bagi masyarakat Kota Langsa khususnya interaksi sosial dengan masyarakat yang berbeda kepercayaan terus terjalin dengan baik hingga saat ini, tidak terdapat gerakan-gerakan anarkisme dalam berbangsa dan bernegara, hubungan baik itu

⁴³Munawar Ahmad, *Politik Kerukunan Umat Islam Beragama*, (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hal.290

terbina dengan sendirinya, bahkan pada masa konflik terjadi di Aceh. Bagi masyarakat Kota Langsa serasa bagai tidak terbias kepada kehidupan sosial, bagi masyarakat Aceh secara umumnya beranggapan bahwa konflik waktu saat itu hanya disebabkan oleh kesetaraan pembagian hak antara pusat (Jakarta dengan Aceh) yang dirasakan tidak adil sebagaimana keutamaan masyarakat Aceh dalam studi history yang berhubungan baik antara Jakarta dan Aceh.

Dalam interaksi kehidupan beragama dikalangan masyarakat Kota Langsa bagi Ormas-Ormas Islam Kota Langsa selama ini aktif bergerak dalam mensi'arkan ajaran-ajaran tauhid, bahkan ajaran-ajaran Islam terkadang diikuti oleh masyarakat yang non muslim seperti masyarakat yang beragama Kristen, Hindu dan Budha. Bahkan sebaliknya dalam intraksi sosial ditengah-tengah masyarakat saling menghormati antara satu dengan yang lainnya seperti acara pernikahan, kemalangan (ada sanak family meninggal) maka sama-sama memenuhinya untuksaling bergotong royong.

Sejauh ini dalam upaya mengatasi faham yang dapat merusak itensitas masyarakat di Kota Langsa, maka setiap Ormas Islam di Kota Langsa terus menggalakkan pemahaman bahwa Islam bukan agama radikal bahkan sebaliknya Islam adalah agama yang *rahmatan lil'alamin*. Kehidupan yang harmonis mencerminkan bahwa toleransi dan tidak mengandung nilai-nilai radikalisme hingga saat ini masih terjadi di Kota Langsa. Pernah ada memang peristiwa yang hampir merusak hubungan harmonis ini. Namun, oleh karena kebijakan dan ketegasan pimpinan daerah bekerjasama dengan para penegak hukum di Kota Langsa serta kesadaran masyarakat yang tinggi masalah tersebut dapat teratasi dengan baik.

Peran lain yang selama ini terus di jaga hubungannya agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merusak hubungan baik sesama warga. Baik dalam satu suku yang sama maupun tidak atau kepercayaan lain adalah dengan saling bahu membahu untuk saling mewaspadaai agar tidak mudahnya para profokasi untuk merusak kehidupan sosial ini ditengah-tengah masyarakat adalah dengan saling memberi informasi dan menyampaikan kepada pemerintah Kota Langsa untuk

selanjutnya dapat diambil tindakan tegas sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

I. PENUTUP

Dari hasil penelitian ini, dapat peneliti simpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan hasil penelitian yaitu; 1) Upaya Ormas-ormas Islam Kota Langsa dalam membendung paham radikalisme dan intoleransi adalah dengan memberikan bimbingan atau arahan pada Umat Islam khususnya dan semua lapisan masyarakat pada umumnya, karena tidak dapat dipungkiri bahwa penduduk di Aceh atau yang di kenal dengan serambi mekah ini mayoritas penganut Agama Islam. Salah satu kegiatan Ormas Islam ini adalah membuka majelis-majelis ta'lim, tujuannya agar Umat Islam dapat menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan dalam ajaran Islam itu sendiri dengan saling menghargai perbedaan untuk menjaga persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. 2) Peran Ormas-ormas Islam Kota Langsa dalam membendung paham radikalisme dan intoleransi adalah dengan memberikan dukungan berupa ikut bekerjasama dengan pemerintah Kota Langsa, Ulama, Penegak Hukum dan semua lapisan masyarakat untuk melaksanakan pengawasan tidak terjadigerakan radikalisme dan intoleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3) Faktor penyebab munculnya paham radikalisme dan intoleransi adalah bisa dari ketidak harmonisan dalam keluarga itu sendiri sehingga kurangnya peran orang tua dalam memantau perkembangan anak, ada juga yang berpendapat bahwa ada segelintir kelompok khusus yang dibentuk dan dibina untuk menghancurkan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Irfan., *Islamism and Democracy in India: The Transformation of Jamaate-Islami*, British: Princeton University Press and Princeton And Oxford, 2009
- Ahmad, Munawar., *Politik kerukunan Umat Islam Beragama*, Yogyakarta: Suska Press, 2013
- Alwi, Hasan., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2002

- Asshiddiqie, Jimly., *"Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Azra, Azyumardi, *Konflik Baru Antar Peradaban, Radikalisme & Pluralitas* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- A.V Dicey, *"An Introduction to The Study of The Law of Constitution"*, Oxford: Oxford
- Badhudu, Jain., *"Kamus Umum Bahasa Indonesia"*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994
- Bahri, Syamsul., *Organisasi Masyarakat dan Gerakan Pembaharuan*, Jakarta: Gramedia 2004
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Bungin, Burhan., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Gajah Mada, 2001
-, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga Universitas Press, 2001
- Dania, Maya, *Empati dan Identitas Sosial*, Kompas, 22 Desember 2011
- Donnelly, Jack., *"Universal Human Rights in Theory and Practice"*, London: Cornel University Press, 2003
- Echols John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* Jakarta: PT. Gramedia, 2007
- Gilarnic, David G., *Webster's Wold Dictionary of America Language* New York: The World Publishing Company, 1989
- http://id.wikipedia.org/wiki/intoleransi_keberagamaan.didownload tanggal. 22 juni 2019, pukul 13.45 Wib
- <http://www//Syukri-Ilyas-Oragnisasi-Dalam-Al-Qur'an-diakses-tanggal-28-januari-2014>, download tanggal.22agustus2019
- Kartono, Kartini, *"Pemimpin dan Kepemimpinan"*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metode Penelitian*, Bandung: Sinar Baru, 2002

- Kemdikbud, *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*, Diakses tanggal 4 agustus 2016. Download tanggal 22 juni 2019, pukul 13.21 Wib
- Noor, M. Hasan, “*Islam, Terorisme, dan Agenda Global*” Pertas, Vol.V/No.02/202
- Mahfud, Moh. MD,, “*Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*”, Jakarta: Rajawhali Pres., 2008
- Manulang, M., *Dasar-dasar Manajemen*, Yogyakarta: UGM Press, 2015
- Marwah, Basri, Hassan, *Islam & Barat Dalam Membangun Teologi Dialog*, Jakarta: L.S.I.P, 2004
- Meizita, Tiara., *Framing Analisis Pro Kontra RUU Ormas di Media Suara Pembaruan dan Republika*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya: 2013
- Mubarak, *Genealogi Islam Radikal di Indonesia*
- Muhammad, Malik, “Pluralisme Agama dan Toleransi Dalam Islam,” Jurnal penelitian dan Informasi Keagamaan, No. 54 Th.2015, Desember
- Muhammad,Farouk., *Metodologi Penelitian Sosial*, Bandung: Restu Agung, 2005
- Munawir, Warson, Ahmad, *Kamus Arab Indonesia: al-Munawir* Yogyakarta: Progresif Balai pustaka, t.th
- Narbuko, Cholid.,*Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003
- Nasional Kompas.com, Diakses tanggal 6 april 2016. Download tanggal 22 juni 2019, pukul 13.22 Wib
- Nurjanah, *Radikal Versus Moderat*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004,
- Pramono, Gatot Eddy, *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol, 1 Jakarta: Jurnal 2015
- Rasyid, Muhammad, *Mendialogkan Ahmadiyah*, Bandung: Neraca Press, 2015
- Sitorus, Masganti.,*Metode Pendidikan Islam*, Medan: IAIN Press, 2011
- Sjadzali, Munawir.,*Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* Jakarta: UI Press, 1990

- Soekanto, Soerjono., *Kamus Sosiologi*, Jakarta: Royandi, 2000
- Sugiyona, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabet, 2005
- Suparlan, Pasurdi., *Pembentukan Karakter*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008
- Sutton, Margaret. *Nilai-nilai Dalam Pelaksanaan Demokrasi*. Jurnal: Vol. 2, No. 1 tahun 2016. unp.ac.id/index.php/jd/article/viewFile/1070/902 pada hari Selasa, 4 April 2017 pukul 13.38 WIB.
- Takwin, Bagus dkk, *Penelitian Tentang: Studi Toleransi dan Radikalisme; pembelajaran dari 4 daerah Tasilmalaya, Jogjakarta, Bojonegoro dan Kupang*, Jakarta: Infid, 2016
- Thalib, J.U, *Radikalisme dan Islamophobia, Islam dan Terorisme*, Yogyakarta: UCY, 2003
- Tilaar, H.A.R, *Pendidikan , Kebudayaan dan Masyarakat Madani di Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000
- Usman, Husaini., *Metodelogi Penelitian Sosial*, Jakarta, Bumi Aksara, 2009
- Wahid, Abdurrahman, *Islam ku Islam Anda dan Kita: Agama Masyarakat Negara dan Demokrasi* Jakarta: The Wahid Institut, 2006
- Latif, Yudi., *Inteligensia Moslim Dan Kuasa, Ginealogi Intheligensia Moslim Indonesia Abad Ke-xx* Bandung: Mizan, 2005
- Zuhdi, M. Nurdin, “Perempuan dalam Revivalisme: Gerakan Revivalisme Islam dan Politik Anti Feminisme di Indonesia,” dalam Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol. 9, No. 2, Juli 2010.